



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman: 1

Pengemudi Taksi Geruduk DPRD

■ Minta Klarifikasi Pernyataan Rifki Listianto

YOGYA, TRIBUN - Puluhan pengemudi taksi yang tergabung dalam paguyuban pengemudi taksi dengan argo meter Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggeruduk gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (13/3) siang. Mereka meminta Dewan bisa memberikan klarifikasi dan dukungan di tengah pro dan kontra taksi online di wilayah ini.

Para pengemudi taksi ini merasa gerah dengan pernyataan dari salah satu anggota Dewan, Rifki Listianto yang meminta agar kendaraan online bisa dilegalkan dan hadirnya kendaraan online ini jangan langsung dilarang, karena beragam alasan diantaranya pengantasan pengangguran.

● ke halaman 11

Pengemudi Taksi Geruduk DPRD

● Sambungan Hal 1

Pernyataan ini membuat para pengemudi taksi dengan argo meter merasa tidak didukung perjuangannya. Apalagi, Pemerintah Provinsi akan segera mengeluarkan aturan terkait taksi online.

"Kami datang ke sini untuk mengklarifikasi dan minta bertemu dengan Pak Rifki. Kami berharap sebagai anggota Dewan dan wakil rakyat, seharusnya mengeluarkan pernyataan yang bijak mengenai pro dan kontra menghadapi taksi online," ujar Ketua Paguyuban Pengemudi Taksi dengan Argometer DIY, Sutiman usai beraudiensi di DPRD.

Sutiman mengatakan, anggota paguyuban yang berjumlah 1.000an pengemudi taksi dari 20 perusahaan merasa sangat sensitif dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi B DPRD setempat itu. Beberapa pengemudi taksi yang membaca pernyataan Rifki dari media massa kemudian berupaya untuk mempertanyakan dukungan Rifki pada legalitas kendaraan online.

"Kami berusaha meredam emosi kawan-kawan agar tidak melakukan aksi di DPRD. Biarlah kami temui perwakilan dan baik-baik agar tidak anarkis," katanya.

Hanya saja, Sutiman menilai pernyataan dari politisi PAN ini tidak tepat, di saat Gubernur DIY akan mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) selangkah lagi. Apalagi, kata dia, keputusan untuk melarang taksi online

ini sudah diperjuangkan pihaknya sejak beberapa tahun terakhir setelah munculnya Grab, Uber dan juga GoJek.

Perkembangan Zaman

Dalam kesempatan itu, Sutiman mengaku para pengemudi taksi berargometer tidak menolak dengan kehadiran aplikasi, bahkan beberapa sudah mulai menerapkannya. Hanya saja, aplikasi tersebut seharusnya diterapkan pada taksi resmi berplat kuning, bukan di taksi yang berplat hitam.

"Kami sudah berupaya untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Namun, harus sesuai aturan dan diterapkan pada kendaraan yang resmi," ujar Sutiman yang bekerja sebagai sopir taksi sejak 24 tahun silam.

Selama ini, kata Sutiman, pengemudi taksi berargometer di Yogyakarta sudah bekerja sesuai aturan. Termasuk dalam penggunaan argometer tiap nark. Sesuai SK Gubernur DIY sudah diatur tarif buka pintu sebesar Rp 6.650 dan tarif per kilometer sebesar Rp 4.000. Dalam penggunaan argo juga terdapat argometer berdasarkan waktu dan jarak. Untuk argo berhenti sejam itu Rp40 ribu, sudah diatur dalam SK Gubernur.

Resah

Wismu, salah satu pengemudi taksi berargo meter mengatakan, pihaknya juga cukup resah dengan masih maraknya taksi online berplat hitam yang tidak segera diatur pemerintah. Apalagi, dengan adanya pernyataan dukungan pada taksi online membuatnya semakin gerah. "Kami minta ada proses klarifikasi karena pernyataan seperti itu melanggar kode etik anggota Dewan," jelasnya.

Sementara dalam audiensi yang diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta, Ritrik Banowati, para pengemudi taksi berargometer meminta Rifki Listianto segera memberikan jawaban atau klarifikasinya dalam waktu dua hari. Jika tidak, para pengemudi mengancam akan kembali menggeruduk Dewan dengan massa dalam jumlah lebih banyak.

Dilegalkan

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Ketua Komisi B, Rifki Listianto menjelaskan, pernyataan sikap yang diberikannya pada beberapa hari lalu di media massa itu untuk menyikapi pelarangan angkutan kendaraan online. Dia memang meminta agar munculnya kendaraan online itu tidak dilarang atau dihapuskan begitu saja.

"Tetapi dilegalkan dengan payung hukum dan aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diikuti oleh pelaku transportasi online," jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini belum bisa memberikan transportasi yang ramah, nyaman dan mudah. Namun, ada swasta yang menawarkan inovasi aplikasi. Maka, dia meminta masyarakat untuk bebas dan memiliki hak menentukan sendiri pilihannya dengan pilihan transportasi aman, murah, dan nyaman.

"Apalagi, perlu diakui munculnya transportasi online dapat diterima masyarakat Yogyakarta dan juga bisa menekan angka pengangguran dalam pekerjaan," ulasnya. (ais)

Instansi

1. Dinas Perhubungan
2.
3.
4.
5.

✓Netral
✓Biasa
✓untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005